

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan adalah suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan sumber daya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisiensi dan efektif untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik ditahun yang akan datang.

Rencana Kinerja Tahunan pembangunan bidang perhubungan merupakan dokumen perencanaan yang merupakan suatu penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Depok (Renstra) Tahun 2016-2021 yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat Kota Depok, dikarenakan transportasi darat memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional serta Kota Depok pada khususnya, mengingat transportasi merupakan sarana untuk memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan serta semua aspek kehidupan.

Penyelenggaraan perhubungan bertujuan untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur dan juga efisien serta mampu memadukan moda transportasi lainnya yang menjangkau seluruh pelosok wilayah dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu diwujudkan suatu kegiatan Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan serangkaian dari beberapa kegiatan dibidang transportasi darat yang menghubungkan wilayah-wilayah kegiatan sehingga akan membentuk suatu kesatuan sistem jaringan transportasi bagi penyelenggaraan perhubungan.

Dengan telah digulirkannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah secara mandiri.

Guna menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial Kemasyarakatan Pemerintah Kota Depok telah menyusun RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 ini disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2104;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;

17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan;
18. keputusan walikota depok nomor 113 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perhubungan;

1.3 Dasar Pemikiran

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas dan pelayanan publik dibutuhkan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga dapat terwujud sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dinas Perhubungan Kota Depok dalam hal pengguna anggaran di daerah mempunyai kewajiban akan hal tersebut.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019 disusun sebagai dasar acuan dalam pencapaian tujuan dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat lebih terarah dan berjalan dengan baik. Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan yang ada serta meningkatkan fungsi dan hasil penggunaan anggaran.

1.4 Permasalahan yang dihadapi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Depok dihadapkan pada permasalahan dan faktor-faktor penyebab permasalahan sebagai berikut :

- Faktor SDM :
 - a) Kompetensi SDM;
 - b) Peningkatan standar kualifikasi aparatur melalui diklat maupun bintek yang masih kurang;
 - c) Masih kurangnya jumlah SDM.

- Faktor Sarana dan Prasarana :
 - a) Jumlah kendaraan operasional yang belum memadai;
 - b) Jumlah peralatan pendukung sarana dan prasarana kurang memadai;
- Faktor Penganggaran :
 - a) Masih rendahnya proporsi penganggaran Dinas Perhubungan Kota Depok untuk memenuhi standar minimal diberikan sesuai dengan ketentuan.
 - b) Anggaran 50% untuk pembayaran listrik PJU sehingga untuk kegiatan lainnya masih belum optimal.

1.5 **Prioritas Pembangunan**

Sesuai dengan Misi Pertama yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 Dinas Perhubungan Kota Depok mengacu ke Misi 1 dan ke 4 yaitu :

Misi 1 :

Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan.

Misi 4:

Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga.

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Perhubungan Kota Depok mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan,
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan
4. melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

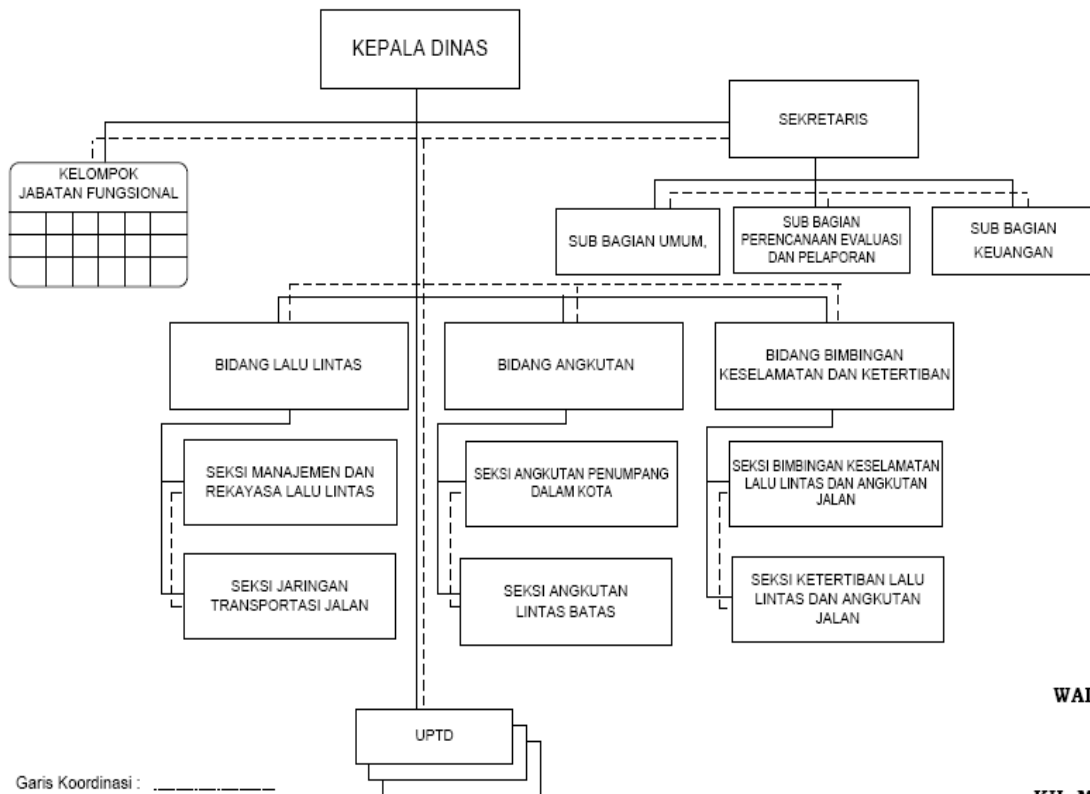
1.6 Struktur Pemerintahan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perhubungan Kota Depok dipimpin oleh Kepala Dinas, yang membawahi :

1. Sekretariat, membawahi sebanyak banyaknya 3 Sub Bagian, antara lain :
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Lalu Lintas, membawahi sebanyak banyaknya 2 Seksi, antara lain :
 - Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas,
 - Seksi Jaringan Transportasi Jalan.
3. Bidang Pengendalian dan Operasi membawahi sebanyak banyaknya 2 Seksi, antara lain:
 - Seksi Pengendalian Lalu Lintas
 - Seksi Bimbingan, Keselamatan dan Ketertiban.
4. Bidang Angkutan, membawahi sebanyak banyaknya 2 Seksi, antara lain:
 - Seksi Angkutan Penumpang Dalam Kota,
 - Seksi Angkutan Lintas Batas.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
 - UPT Penerangan Jalan Umum
 - UPT Terminal
 - UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Depok, dapat dilihat pada gambar berikut :

NOMOR : 113
TAHUN : 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN



Garis Koordinasi : _____

Garis Komando : _____

WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MUHAMMAD IDRIS

1.7 Sistematika Penulisan

Substansi yang tercakup dalam RKT Perubahan Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Dasar Pemikiran
- 1.4 Permasalahan yg Dihadapi
- 1.5 Prioritas Pembangunan
- 1.6 Struktur Pemerintahan
- 1.7 Sistematika Penulisan



BAB II RENCANA STRATEGIS

2.1 Visi

2.2 Misi

2.3 Tujuan

2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

2.5 Kebijakan dan Program

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2018

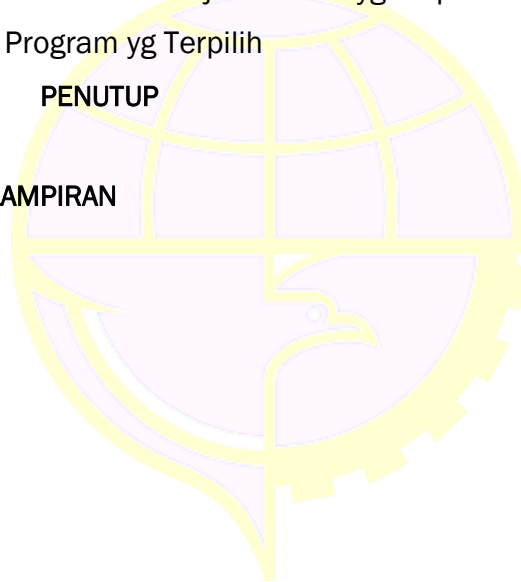
3.1 Sasaran yg Terpilih

3.2 Indikator Kinerja Sasaran yg Terpilih

3.3 Program yg Terpilih

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi RPJMD

OPD Dinas Perhubungan Kota Depok adalah salah satu OPD yang ada di Kota Depok dan bertugas untuk melaksanakan program kerja dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebagai bagian dari perangkat yang melaksanakan program kerja kepala daerah terpilih, maka dalam menjalankan tugasnya harus selalu merujuk pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

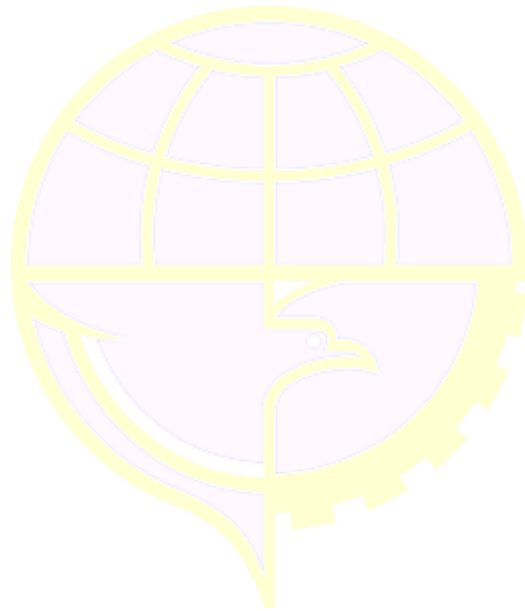
Visi Kepala Daerah Kota Depok, periode 2016-2021 adalah :

“ Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius “

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Kota Depok yang Maju dan Sejahtera tersebut, Misi pemerintah daerah Kota Depok adalah

- 1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan.**
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kreatif dan Berdaya Saing.
3. Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan berbasis Ekonomi Kreatif.
- 4. Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga.**
5. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Nilai-nilai Agama dan menjaga Kerukunan antar Umat Beragama serta meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara.

Telaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Tabel. II.1 Matrik RPJMD RIVIU MENPAN





NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS								CARA MENCAPAI TUJUAN & SASARAN			KET		
					TARGET										
					2017	2018	2019	2020	2021						
			1.	Nilai evaluasi SAKIP	Nilai	B	B	B	B	BB	1.	Melaksanakan reviu kinerja organisasi secara berkala	Peningkatan kualitas tatalaksana dan kinerja	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
			2.	Survey Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri	Nilai	baik	baik	baik	baik	baik	2.	Meningkatkan penerapan ISO	Peningkatan kualitas sistem manajemen mutu	Peningkatan kualitas perencanaan	
			3.	Persentase panjang jalan di Kota Depok terlayani PJU	Persentase	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	3.	Melaksanakan pemetaan Jalan di Kota Depok yang belum terlayani PJU	Peningkatan kualitas layanan PJU	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi	
			4.	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	Persentase	98%	98%	98%	98%	98%	4.	Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala	Peningkatan Kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Peningkatan layanan transportasi umum	
			5.	Jumlah terminal terpelihara secara layak	Lokasi	2	2	2	2	2	5.	Meningkatkan pengelolaan terminal secara profesional	Peningkatan kualitas terminal	Penyediaan simpul transportasi	
													Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi		



											Pengembangan keterpaduan layanan antar dan intra moda yang berbasis Transit Oriented Development (TOD);		
		2.	Presentase menurunnya tingkat kecelakaan	Persentase	4.54%	4.44%	4.34%	4.24%	4.14%	2.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana pendukung keselamatan lalu lintas	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung keselamatan lalu lintas	
										3.	Mengembangkan sistem angkutan massal yang didukung oleh angkutan umum yang handal	Pembangunan simpul-simpul transportasi;	Penyediaan simpul transportasi
										4	Meningkatkan kualitas layanan transportasi umum	Peningkatan kualitas layanan transportasi umum	Peningkatan layanan transportasi umum

Dari lima misi yang ada, Dinas Perhubungan memiliki kepentingan yang kuat untuk berkontribusi mewujudkannya, terutama dalam mewujudkan Misi yang ke-4, yakni :

“Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga”

2.2. Tujuan, sasaran, indikator kinerja dan program kegiatan Renstra

A. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkanlah tujuan sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas pelayanan
- Meningkatkan Kualitas Dan Kapasitas Infrastruktur Transportasi

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka mewujudkan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh dalam rumusan yang spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan visi tersebut, maka ditetapkanlah sasaran sebagai berikut :

Sasaran Tujuan 1 :

- Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik

Indikator Kinerja Sasaran :

- a) Nilai evaluasi SAKIP
- b) Survey Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri
- c) Persentase panjang jalan di Kota Depok terlayani PJJ
- d) Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum
- e) Jumlah terminal terpelihara secara layak

Sasaran Tujuan 2 :

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi

Indikator Kinerja Sasaran :

- a) Kecepatan rata-rata jalan Kota
- b) Presentase menurunnya tingkat kecelakaan
- c) Modal share transportasi umum

2.3. Kebijakan dan Program

Kebijakan dan Program merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Dinas Perhubungan Kota Depok mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra secara efektif dan efisien. Dinas Perhubungan Kota Depok telah merumuskan kebijakan dan program sebagai berikut :

Sasaran Tujuan 2 :

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi

Strategi :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi
- b. Pengembangan keterpaduan layanan antar dan intra moda yang berbasis Transit Oriented Development (TOD)

Program :

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi

Indikator Program :

1. Jumlah park and ride terbangun dan terpelihara
2. Jumlah ITS (intelegent transportation system) terpasang dan terpelihara
3. Persentase panjang jalan kota terlayani PJU
4. Jumlah sarana dan prasarana penyeberangan terbangun dan terpelihara

Kegiatan :

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Pemeliharaan ATCS	Jumlah jaringan ATCS
2	Pengadaan Traffic Light berbasis ATCS	Jumlah Jaringan TL berbasis ATCS
3	Pemantauan Arus Lalu Lintas menggunakan Kamera CCTV	Jumlah unit kamera pemantau arus lalu lintas
4	Pengadaan dan Pemasangan SLS	Jumlah jenis SLS yang Terpasang
5	Pengadaan Kelengkapan Pengatur lalu Lintas	Jumlah Jenis kelengkapan pengatur lalu lintas
6	Pemeliharaan JPO	Jumlah unit JPO yang dipelihara

7	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan	Jumlah Panjang pagar pengaman jalan
8	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Stick statis	Jumlah traffic stick statis
9	Pengadaan dan Pemasangan RPPJ	Jumlah unit rambu RPPJ
10	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan	Jumlah marka jalan
11	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	Jumlah warning light
12	Pemeliharaan TL dan WL	Jumlah Jenis Komponen Pemeliharaan
13	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Jenis perlengkapan jalan dipelihara
14	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Jumlah unit PJU yang dipasang
15	Pemasangan Penerangan jalan Lingkungan	Jumlah unit PJL yang dipasang
16	Pembangunan RW Terang	Jumlah PJU RW Terang yang dipasang
17	Pemeliharaan PJU	Jumlah jenis komponen pemeliharaan PJU
18	Pelayanan UPTD PJU	Jumlah bulan layanan UPT PJU
19	Pengendalian dan Pembayaran Rekening Listrik	Jumlah Bulan pembayaran rekening listrik PJU
20	Pelayanan Informasi Perhubungan	Jumlah Bulan Pelayanan Informasi Di Dinas Perhubungan
21	Pengadaan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Jumlah Unit Rambu Tipe F, Jumlah unit Rambu Lalu Lintas Standart, Jumlah unit cermin tikungan, Jumlah unit paku jalan

Strategi :

Meningkatkan kualitas layanan transportasi umum

Arah Kebijakan :

Peningkatan kualitas layanan transportasi umum

Program :

Peningkatan layanan transportasi umum

Indikator Program :

1. Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum
2. Faktor muat (load factor) angkutan umum

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Bulan, Jumlah Orang

2	Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah penyelenggaraan forum lalu lintas, Jumlah Orang
3	Sosialisasi Tertib Lalu Lintas	Jumlah bulan pelaksanaan, Jumlah Buku, Jumlah Stikerx
4	Pelayanan Keamanan dan Penertiban Parkir	Jumlah bulan penerbitan parkir Jumlah penertiban parkir
5	Penambahan Jam Pelayanan Pengaturan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Jumlah Pelayanan Pengaturan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
6	Pembinaan Operator Angkutan Umum	Jumlah operator angkutan umum yang dibina
7	Car Free Day	Jumlah segmen, Jumlah Bulan
8	Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas	jumlah petugas pengatur lalin, Jumlah Bulan
9	Pengawasan Pimpinan Daerah	Jumlah bulan pengawasan; Jumlah petugas
10	Pengelolaan Rutin dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pengatur Lalu Lintas	Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara, Jumlah Bulan
11	Pengelolaan Pelayanan PKB	Jumlah bulan layanan UPT PKB
12	Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah peralatan pengujian yang dipelihara
13	Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Uji PKB
14	Pendataan Potensi KBWU Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah penyelenggaraan pendataan kendaraan wajib uji
15	Penyelenggaraan Layanan Perizinan Angkutan	Jumlah orang, jumlah bulan pelayanan perizinan angkutan
16	Pelaksanaan Penilaian Lomba Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata Nugraha)	Jumlah Pelaksanaan WTN
17	Penyelenggaraan parkir di luar badan jalan	Jumlah lokasi parkir diluar badan jalan
18	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Komunikasi	Jumlah Pengadaan HT, Jumlah HT yang dipelihara
19	Pengadaan Dan Pemasangan Gate Parkir	Jumlah unit gate parkir
20	Pengadaan Pos Pengamanan Pengaturan Lalu Lintas dan kelengkapan	Jumlah unit

Strategi :

Mengembangkan sistem angkutan massal yang didukung oleh angkutan umum yang handal

Arah Kebijakan :

Pembangunan simpul-simpul transportasi

Program :

Penyediaan simpul transportasi

Indikator Program :

1. Jumlah halte terbangun dan terpelihara
2. Jumlah terminal terpelihara
3. Jumlah terminal terbangun

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Sewa Lahan Pangkalan Angkutan Umum	Jumlah lokasi pangkalan angkutan umum
2	Pengadaan dan Pemasangan Halte Standar	Jumlah unit halte standar
3	Pengelolaan Terminal Depok	Jumlah layanan UPT Terminal Depok
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Terminal	Jumlah jasa kebersihan terminal
5	Penyediaan Jasa Pengaturan Terminal	Jumlah petugas Pengaturan di Terminal Kota Depok
6	Pemeliharaan Halte	Jumlah unit halte terpelihara
7	Pengadaan Cetak Stiker Angkutan Umum	Jumlah stiker Retribusi
8	Pengadaan Cetak Karcis Retribusi	Jumlah Karcis Retribusi

Strategi :

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Program :

Peningkatan Administrasi Perkantoran

Indikator Program :

Persentase penyediaan administrasi perkantoran

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas (Jasa Kebersihan Kantor), Peralatan dan Bahan Kebersihan yang tersedia
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman yang tersedia
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga

Strategi :

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

Arah Kebijakan :

2. Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Program :

Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Program :

persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang terpelihara
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara
4	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor
6	Pengadaan Sarana Mobilitas	Jumlah unit Kendaraan Bermotor

Strategi :

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Arah Kebijakan :

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Program :

Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan

Indikator Program :

Nilai SAKIP

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan

Strategi :

Meningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Arah Kebijakan :

Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Program :

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur

Indikator Program :

Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional	Jumlah Pegawai

Strategi :

Meningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Arah Kebijakan :

Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Program :

Peningkatan kualitas perencanaan

Indikator Program :

Cakupan integrasi perencanaan

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Surveillance ISO Perijinan Bidang Angkutan	Jumlah Dokumen
2	Surveillance ISO PKB	Jumlah Dokumen
3	DED Pembangunan Meterisasi PJJ	Jumlah Dokumen
4	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
5	Studi Kelayakan Pengembangan Transportasi Massal Berbasis rel	Jumlah Dokumen
6	Kajian Kinerja Ruas dan Persimpangan Jalan	Jumlah Dokumen
7	Kajian Redisain Persimpangan	Jumlah Dokumen
8	Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas	Jumlah Dokumen
9	Survey Kinerja dan Biaya Operasi Angkutan Penumpang Umum	Jumlah Dokumen
10	Studi Kelayakan Park and Ride	Jumlah Dokumen
11	Kajian Revisi Perda Bidang Perhubungan	Jumlah Dokumen

BAB III

RENCANA KINERJA

3.1 Sasaran yang terpilih

Adapun yang menjadi sasaran yang terpilih dalam RKT Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi.

3.2 Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih

Pada kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD Perubahan Kota Depok Tahun 2016-2021 terdapat program pembangunan yang terkait dengan Dinas Perhubungan Kota Depok. Untuk Tahun Anggaran 2019 Target indikator kinerja sasaran yang terpilih yaitu :

- Nilai evaluasi SAKIP = **B**
- Survey Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri = **baik**
- Persentase panjang jalan kota terlayani PJU = **4,31%**
- Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum = **98%**
- Jumlah terminal terpelihara secara layak = **2**
- Kecepatan rata-rata jalan kota = **22 km/jam**
- Presentase menurunnya tingkat kecelakaan = **4.34%**
- Modal share transportasi umum = **28.61%**

3.3 Program yang Terpilih

Dalam pencapaian indikator Renstra Perubahan , *program yang terpilih untuk dilaksanakan pada Tahun 2019 sebanyak 8 (delapan) program yang terdiri dari :*

1. Peningkatan Administrasi Perkantoran dengan pagu indikatif dari sebelum perubahan sebesar Rp. 1.611.403.000 dan setelah perubahan sebesar Rp. 1.711.423.000
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp.1.900.527.000 setelah perubahan sebesar Rp. 1. 922.420.000

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dengan pagu indikatif Rp. 4.900.000,-
4. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu indikatif Rp. 49.999.900,-
5. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dengan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp. 1.149.170.000 dan setelah perubahan sebesar Rp. 1.499.170.000
6. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi dengan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp. 34.882.693.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 37.297.809.000
7. Penyediaan simpul transportasi dengan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp. 2.793.578.000,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 3.076.550.000,-
8. Peningkatan layanan transportasi umum dengan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp. 17.084.779.900 dan setelah perubahan menjadi Rp. 19.058.533.000,-

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan pedoman untuk melaksanakan pengukuran kinerja dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Depok selama periode satu tahun. Pengukuran atas kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan merujuk kepada RKT Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2019. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari telah tersusunnya RKT Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan Kota Depok berkewajiban melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam RKT untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, Dinas Perhubungan Kota Depok harus melakukan pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan melalui upaya perbaikan dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Walikota Depok melalui Bappeda Kota Depok;
3. Pada akhir tahun 2019 Dinas Perhubungan Kota Depok berkewajiban menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dalam bentuk Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAMPIRAN

TABEL RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019

URAIAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2018
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	1	Nilai evaluasi SAKIP	Nilai	B
		2	Survey Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri	Nilai	baik
		3	Persentase panjang jalan kota terlayani PJU	Persentase	4,31%
		4	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	Persentase	98%
		5	Jumlah terminal terpelihara secara layak	Lokasi	2
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi	1	Kecepatan rata-rata jalan kota	km/jam	22 km/jam
		2	Persentase menurunnya tingkat kecelakaan	Persentase	4.34%
		3	Modal share transportasi umum	Persentase	28.61%